

22 TAHUN KELOLA HULU MIGAS

Sumbang 30% Penerimaan Negara, Serap 150.000 Naker



Visualisasi pengelolaan hulu migas dapat disaksikan di Migas Corner, Solo Techno Park.

SELAMA 22 tahun mengelola hulu minyak dan gas bumi (migas), tercatat industri hulu migas sudah berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 5.045 triliun. Migas juga menyumbang 30 persen dari total penerimaan negara. Efek berganda berupa peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga berkontribusi sebesar Rp 76,5 triliun dan telah menyerap 150.000 orang tenaga kerja.

"Selain itu, industri hulu migas berkontribusi sebesar Rp 143,6 triliun terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau mendorong sekitar 9,88 persen pertumbuhan UMKM. Hampir 70 persen pasokan gas juga diutamakan untuk domestik," ungkap Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam Lokakarya Media Periode I Tahun 2024, Kamis-Jumat (25-26/7/2024) di Solo, Jawa Tengah.

Kegiatan ini diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Dalam lokakarya ini, awak media juga diajak mengunjungi Migas Corner di Solo Techno Park, untuk mendapatkan visualisasi tentang industri migas dari hulu hingga

hilir. Termasuk untuk mengenali berbagai fasilitas, peralatan, dan teknologi industri migas beserta perkembangannya.

Hudi mencontohkan Blok Cepu yang mampu berkontribusi melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) senilai Rp 327 miliar dan memberi manfaat kepada lebih dari 200.000 masyarakat. PPM tersebut fokus di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi. Proyek migas di Jawa Timur meski tidak berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi menjadi penting karena statusnya sebagai Proyek Strategis Hulu Migas 2024.

"Semua proyek itu bisa berjalan jika suasana kondusif. Suasana kondusif inilah yang

diharapkan bisa didukung oleh rekan-rekan media," tegas Hudi.

Peran media massa dalam mendorong kemajuan industri hulu migas diapresiasi oleh SKK Migas. Keberhasilan industri hulu migas tidak terlepas dari kontribusi aktif media massa. Termasuk media di daerah. "SKK Migas merasakan upaya rekan-rekan media lokal dan regional yang telah berkontribusi positif terhadap industri ini," ucap Hudi.

SKK Migas, kata Hudi, terus melakukan berbagai upaya dan Kerja sama dengan media. Berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan menjaga agar semua pemangku kepentingan tetap mendukung kelancaran operasi migas.

"Media sudah sangat aktif membantu kami. Misalnya saja, hingga Juni 2024 sudah ada sekitar 13.000 pemberitaan tentang industri hulu migas. Luar biasa," puji Hudi.

Selain Hudi, kegiatan Lokakarya Media Periode I Tahun 2024 ini dihadiri Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Febrian Ihsan, beberapa pimpinan tinggi dan staf kehumasan/komunikasi KKKS, dan jurnalis-jurnalis dari 32 media dari wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.



Peserta lokakarya mendapat penjelasan seputar industri hulu migas di Migas Corner, Solo Techno Park.

Menegaskan penjelasan Hudi, Febrian mengatakan, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Jabanusa terlibat banyak dalam kegiatan Lokakarya Media, Uji Kompetensi Wartawan, dan penyebaran siaran pers lainnya. "Harapannya dengan kegiatan-kegiatan tersebut, hubungan SKK Migas-KKKS-Media semakin baik dan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Kami juga berharap Pemerintah Pusat mendukung kegiatan-kegiatan kehumasan industri hulu migas terutama dalam situasi yang

daerah penghasil migas memiliki pengetahuan, pemahaman atau persepsi yang terlalu sederhana mengenai bagi hasil," ungkap Rinto.

Menurut Rinto, peran bisnis hulu migas seperti menghasilkan APBN dan APBD, mendorong efek multiplier ekonomi daerah dan nasional juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Daerah penghasil migas tentu mendapat bagi hasil dengan porsi lebih besar. Daerah nonpenghasil tetap mendapatkan juga meski dengan porsi yang



Lokakarya Media Periode I-2024 SKK Migas-KKKS Jabanusa di Solo.

penuh tantangan seperti sekarang ini," harap Febri.

Sementara pengamat migas Rinto A Pudyantoro menyatakan, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita industri hulu migas. Karena komunikasi yang baik menjadi sangat menentukan dalam menyampaikan pesan atau informasi seputar industri hulu migas bagi daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Migas, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

Dosen Universitas Pertamina tersebut mengulas tentang peran penting media di daerah dalam memajukan industri hulu migas. "Komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik, menjadikan daerah-

lebih kecil.

Sementara Founder & Sekretaris Energy & Mining Editor Society Dudi Rahman menjelaskan mengapa media perlu meliput industri hulu migas karena industri ini memberikan kontribusi pendapatan besar bagi bangsa ini. Masyarakat juga berhak tahu tentang industri ini. Media juga wajib menyuarakan informasi sebagaimana fungsinya.

"Selain itu, Pemerintah juga butuh masukan untuk membuat kebijakan. Industri ini juga butuh dukungan dari stakeholders dan sebagai media dialog antara pemerintah, industry dan masyarakat itu sendiri," jelas Pimpinan Forum Editor Energi tersebut.

(M Nur Hasan)

TINGGI, ANGKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Alarm, Agar Persoalan Anak Tidak Dinomorduakan

BOCAH itu menolak pergi mengaji. Setelah didesak orangtua, akhirnya bocah mengaku sering dipegang-pegang oleh oknum guru mengajinya. Ini bukan pertama. Sanksi sosial yang pernah dijatuhkan pada guru ngaji dengan mengusir pergi dari rumahnya tidak menjerakan pelaku. Penyelesaian baik-baik, ternyata diabaikan. Kini sebagaimana diberitakan 'Kedaulatan Rakyat' (29/7), warga melaporkan ke Polres Gunungkidul. Miris, diduga 10 anak di bawah umur, menjadi korban pelecehan SU (28).

Anak, masih merupakan kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kepala DP3AP2KB DIY Erlina Hidayati, awal Juni lalu mengungkap, pada Januari-Mei 2024 di DIY sudah ada 72 kasus hukum kekerasan baik kepada anak maupun perempuan.

Sementara selama 2023 dari semua layanan korban mulai UPT PPA serta LSM yang menangani kasus, terdapat angka 165 kasus. Terinci 13 kasus perkosaan, 56 kasus pencabulan dan 96 kasus pelecehan seksual.

Realita yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampaknya, regulasi dalam bentuk Undang Undang pun belum mampu meminimalisasi kasus kekerasan seksual pada anak.

Padahal angka-angka yang



ILUSTRASI : ARKO

terungkap ini sejatinya merupakan fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus serupa yang tidak dilaporkan. Karena tidak jarang, kasus terjadi dengan ancaman yang membuat anak-anak menjadi takut dan memilih diam.

Mengkhawatirkan

Harus diakui, kondisi anak hari ini cukup mengkhawatirkan. Selain anak korban pengasuhan semakin banyak, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr Dyah Puspitarini mengakui jika anak korban kekerasan seksual dan kekerasan fisik masih mendominasi pemasalahan anak. Yang lebih memprihatinkan menurutnya, angka hari ini semakin naik dan jenis kasus-kasusnya pun semakin beragam.

"KPAI melihat ini sebagai

alarm agar persoalan anak tidak lagi dianggap sebagai persoalan nomor dua. Yang dikesampingkan daripada persoalan politik dan infrastruktur bangsa yang lain," tandas Dyah.

Sesuai Pasal 20 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, harusnya yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak salah satunya adalah negara, yang dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh Pemerintah. Namun lanjut Dyah, melihat kondisi persoalan anak yang cukup tinggi, membuat KPAI melihat bahwa perlindungan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya.

"Artinya, masih terdapat berbagai persoalan dan upaya yang harus lebih diintensifkan untuk melakukan perlindungan anak Indonesia. Salah satunya dengan menaikkan anggaran

Pemerintah untuk perlindungan anak yang masih sangat kecil. Juga kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak," tambahnya serius.

Secara lebih detail sosiolog UGM, Desintha Dwi Asriani PhD menyebut, dalam hal ini negara perlu menunjukkan 'standing position'-nya. Bagaimana perspektifnya terkait isu akan kekerasan seksual anak dan bagaimana komitmen menghadapi hal tersebut. "Sebab meski ada Undang Undang, tetapi dalam praktik implementasinya masih menghadapi tantangan. Bahkan ada UU TPKS saja, di daerah sulit sekali mengimplementasikan sebab berbenturan dengan hukum adat," tambahnya.

Karenanya dalam konteks anak, Desintha berharap, perlu dilihat juga integrasi penanganan masalah kekerasan seksual pada anak dengan UUPA.

Sanksi

Pelaku kekerasan seksual pada anak, tidak jarang adalah orang terdekat. Jika kemudian pelaku dan korban adalah anak, bagaimana sanksi yang harus diberikan?

Persoalan anak seyogyanya memang tidak dilihat dengan perspektif orang dewasa. Demikian pula bila korban dan pelaku sama-sama masih dalam usia anak.

Sebagaimana disebutkan

dalam UUPA, ada beberapa hak anak yang bisa digunakan untuk melindungi anak. Dalam kasus kehamilan tak dikehendaki yang dialami anak, sebut Desintha, dengan UUPA sudah cukup kuat. Tetapi kembali lagi, lanjut Dosen Fisipol UGM ini, dalam implementasi di komunitas/daerah, masalah benturan dengan hukum adat/hukum local bisa terjadi. Sehingga belum tentu kasus yang sama akan mendapat respons/penanganan hukum yang sama juga. "Masalah ini agak kompleks. Sehingga melihatnya perlu case by case. Kita lihat bagaimana keparahannya, dampak dan problematik pelaku. Apa pelaku perlu diberi pendampingan, pendidikan yang berupaya memberi pandangan/perspektif baru terkait kesetaraan jender," sebut Desintha.

Atau pelaku yang masih anak ini perlu dipidana? Hanya tetap saja, lanjutnya, ada kasus yang sanksinya memang perlu cukup berat seperti 'gang rape'. Pada intinya, hukuman memiliki tujuan memberikan pendidikan. Kalau hukuman atau sanksi tanpa perspektif apapun, hukuman tidak membuat perubahan pada pelaku.

"Pada kasus anak, seyogyanya tetap harus dilihat case by case," tambahnya.

(Fadmi Sustiwi)